



# DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TAHUN 2025

1. DIPA PETIKAN
2. DIPA PETIKAN REVISI Ke 01
3. DIPA PETIKAN REVISI Ke 02
4. DIPA PETIKAN REVISI Ke 03
5. DIPA PETIKAN REVISI Ke 04
6. DIPA PETIKAN REVISI Ke 05

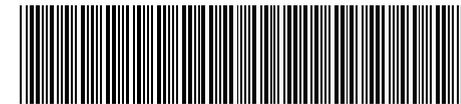
**BPSPL PONTIANAK**

**2025**





**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 032.07.2.477425/2025**



DS:2409-0063-9790-1350

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

1. Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2. Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
3. Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
4. Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK
- Sebesar : Rp. 16.846.280.000 ( ENAM BELAS MILIAR DELAPAN RATUS EMPAT PULUH ENAM JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

**Terlampir**

**Terlampir**

Jumlah Uang

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	11.421.280.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	5.425.000.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN PONTIANAK (042) Rp. 16.846.280.000

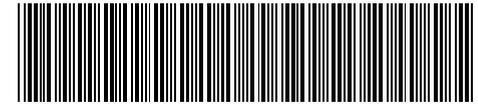
**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025**



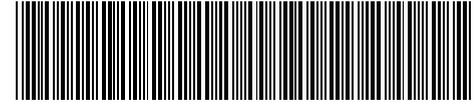
DS:2409-0063-9790-1350

Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

---

04	EKONOMI	Rp.	11.621.280.000
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	Rp.	11.621.280.000
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp.	5.225.000.000
05.04	KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	Rp.	5.225.000.000

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025**

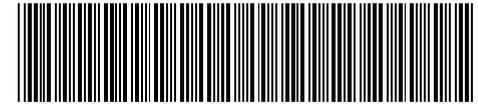


DS:2409-0063-9790-1350

Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	Rp.	4.350.000.000
FD.2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	Rp.	4.350.000.000
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Rp.	1.075.000.000
HB.2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp.	200.000.000
HB.2366	Penataan Ruang Laut	Rp.	875.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	11.421.280.000
WA.2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Rp.	11.421.280.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



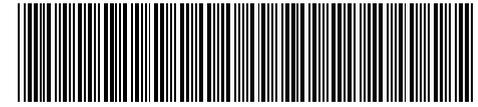
DS:2409-0063-9790-1350

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : I A. 1

Program	:	032.07.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup				4.350.000.000	
Kegiatan	:	2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan				4.350.000.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Luas Kawasan Konservasi Baru					
		2. 02	Luas Kawasan Konservasi yang Efektif Dikelola (kumulatif)					
		3. 03	Tingkat Kinerja Pengelolaan Kawasan Konservasi (%)					
		4. 04	Tingkat Kinerja Pengelolaan Konservasi Biota Perairan (25 jenis) (%)					
Klasifikasi Rincian Output	1	:	2362.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		2,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	200.000.000
Rincian Output	:	01	PBW.001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi Ekosistem (PN)		2,00	Rekomendasi Kebijakan	200.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	2362.PCA	Perizinan Produk		5,00	Produk, Keputusan	1.752.592.000
Rincian Output	:	01	PCA.002	Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan (PN)		5,00	Produk	1.752.592.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	2362.PEE	Kemitraan		1,00	Kesepakatan	150.000.000
Rincian Output	:	01	PEE.001	Kerjasama, Jejaring dan Kemitraan Konservasi Ekosistem (PN)		1,00	Kesepakatan	150.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	2362.QMA	Data dan Informasi Publik		5,00	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	1.211.218.000
Rincian Output	:	01	QMA.001	Data dan Informasi Konservasi Ekosistem (PN)		1,00	dokumen	661.218.000
		02	QMA.002	Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan (PN)		4,00	dokumen	550.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	2362.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan		5,00	Unit	113.500.000
Rincian Output	:	01	RAL.001	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Ekosistem (PN)		5,00	Unit	113.500.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



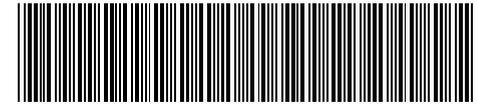
DS:2409-0063-9790-1350

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	6	:	2362.REB	Konservasi Jenis/Spesies		2,00	Jenis	572.690.000
Rincian Output		:	01 REB.001	Konservasi Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendic Cites (kumulatif)	(PN)	2,00	Jenis	572.690.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	2362.SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan		39,00	Orang, Kegiatan	350.000.000
Rincian Output		:	01 SCC.001	Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya	(PN)	15,00	Orang	100.000.000
		:	02 SCC.002	Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Kompetensinya	(PN)	24,00	Orang	250.000.000
Program		:	032.07.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				1.075.000.000
Kegiatan		:	2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				200.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang diberikan bantuan sarana ekonomi produktif (kelompok)				
		:	2. 01	Pulau-pulau kecil yang dimanfaatkan dan ditingkatkan nilai investasinya (pulau) (kumulatif)				
		:	3. 02	Nilai Kemandirian Masyarakat Hukum Adat (Nilai)				
		:	4. 02	Pulau-pulau kecil terluar yang meningkatkan aksesibilitasnya (Pulau) (kumulatif)				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	2365.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	200.000.000
Rincian Output		:	01 PBW.001	Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	(PN)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	200.000.000
Kegiatan		:	2366	Penataan Ruang Laut				875.000.000
		:	1. 01	Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar wilayah (RZ KAW)				
		:	2. 01	Persentase Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang diterbitkan				
		:	3. 02	Kawasan Strategis Nasional yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN)				
		:	4. 02	Persentase KKPRL yang dimonitoring dan evaluasi (%)				
		:	5. 03	Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)				

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:2409-0063-9790-1350

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : I A. 3

Penataan Ruang Laut

- 6. 04 Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun
- 7. 05 Perairan KSNT Non PPKT yang memiliki Rencana Zonasi ditetapkan melalui Peraturan Perundangan
- 8. 06 Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Klasifikasi Rincian Output	2	:	2366.PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Materi Teknis, Dokumen	875.000.000
Rincian Output	01	:	PBT.009	Rekomendasi kebijakan verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang beresiko rendah (PN)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	875.000.000

Program	:	032.07.WA	Program Dukungan Manajemen			11.421.280.000
Kegiatan	:	2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut			11.421.280.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Nilai SAKIP DJPKRL (Nilai)			
		2. 02	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPKRL (Nilai)			
		3. 03	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup DJPKRL (indeks)			
		4. 04	Nilai Kinerja Anggaran KKP (nilai)			
		5. 05	Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan DJPKRL (nilai)			
		6. 06	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup DJPKRL (persen)			
		7. 07	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPKRL (%)			
		8. 08	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL (%)			
		9. 09	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL (%)			
		10. 10	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Ditjen PKRL			
		11. 11	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (%)			

Klasifikasi Rincian Output	1	:	2367.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	8,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	11.140.980.000
Rincian Output	01	:	EBA.956	Layanan BMN	4,00	Layanan	35.780.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:2409-0063-9790-1350

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : I A. 4

Layanan Dukungan Manajemen Internal

					Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	
02	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	45.300.000	
03	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	64.000.000	
04	EBA.962	Layanan Umum	1.00	Layanan	109.900.000	
05	EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	10.886.000.000	

Klasifikasi Rincian Output 2	:	2367.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	30,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	83.900.000	
Rincian Output	:	01	EBC.954	Layanan Manajemen SDM	30.00	Orang	83.900.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	2367.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	196.400.000	
Rincian Output	:	01	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00	Dokumen	60.000.000
		02	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.00	Dokumen	80.100.000
		03	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Dokumen	56.300.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan  
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.  
Victor Gustaaf Manoppo  
NRP. 69030175

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

**NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025**

**I B. SUMBER DANA**



DS:2409-0063-9790-1350

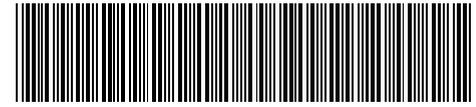
Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
 Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
 Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	16.846.280.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	11.421.280.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	5.425.000.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



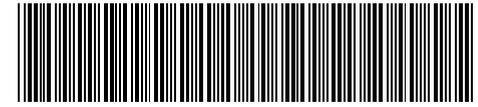
DS:2409-0063-9790-1350

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	8.167.000	8.565.780	113.500	-	-	16.846.280		
032.07.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	-	4.236.500	113.500	-	-	4.350.000		
2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	-	4.236.500	113.500	-	-	4.350.000		
2362.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	200.000	-	-	-	200.000	13 . 51	
04	PNBP	-	200.000	-	-	-	200.000	042@	
2362.PCA	Perizinan Produk (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	1.752.592	-	-	-	1.752.592	13 . 51	
04	PNBP	-	1.752.592	-	-	-	1.752.592	042@	
2362.PEE	Kemitraan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	150.000	-	-	-	150.000	13 . 51	
04	PNBP	-	150.000	-	-	-	150.000	042@	
2362.QMA	Data dan Informasi Publik (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	1.211.218	-	-	-	1.211.218	13 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



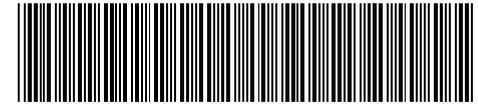
DS:2409-0063-9790-1350

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 PNPB		-	1.211.218	-	-	-	1.211.218	042@	
2362.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	-	113.500	-	-	113.500	13 . 51	
04 PNPB		-	-	113.500	-	-	113.500	042@	
2362.REB	Konservasi Jenis/Spesies (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	572.690	-	-	-	572.690	13 . 51	
04 PNPB		-	572.690	-	-	-	572.690	042@	
2362.SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	350.000	-	-	-	350.000	13 . 51	
04 PNPB		-	350.000	-	-	-	350.000	042@	
<b>032.07.HB</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</b>	-	<b>1.075.000</b>	-	-	-	<b>1.075.000</b>		
<b>2365</b>	<b>Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	-	<b>200.000</b>	-	-	-	<b>200.000</b>		
2365.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	200.000	-	-	-	200.000	13 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



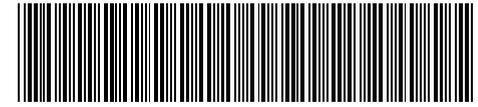
DS:2409-0063-9790-1350

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 3  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	PNBP	-	200.000	-	-	-	200.000	042@	
<b>2366</b>	<b>Penataan Ruang Laut</b>	-	<b>875.000</b>	-	-	-	<b>875.000</b>		
2366.PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	875.000	-	-	-	875.000	13 . 51	
04	PNBP	-	875.000	-	-	-	875.000	042@	
<b>032.07.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>8.167.000</b>	<b>3.254.280</b>	-	-	-	<b>11.421.280</b>		
<b>2367</b>	<b>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut</b>	<b>8.167.000</b>	<b>3.254.280</b>	-	-	-	<b>11.421.280</b>		
2367.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	8.167.000	2.973.980	-	-	-	11.140.980	13 . 51	
01	RM	8.167.000	2.973.980	-	-	-	11.140.980	042@	
2367.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	83.900	-	-	-	83.900	13 . 51	
01	RM	-	83.900	-	-	-	83.900	042@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:2409-0063-9790-1350

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK  
Kewenangan : (KD)

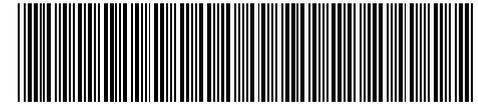
Halaman : II. 4  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
2367.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	196.400	-	-	-	196.400	13 . 51	
01 RM		-	196.400	-	-	-	196.400	042@	
<b>JUMLAH</b>		<b>8.167.000</b>	<b>8.565.780</b>	<b>113.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.846.280</b>		

Jakarta, 02 Desember 2024  
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan  
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.  
Victor Gustaaf Manoppo  
NRP. 69030175

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



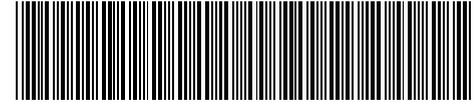
DS:2409-0063-9790-1350

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	477425	<b>BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	733.357	1.068.968	1.568.814	1.922.052	1.802.653	1.961.153	1.429.462	1.232.174	1.351.976	1.277.854	1.169.180	1.328.640	16.846.280
		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	583.357	583.357	1.166.714	583.357	583.357	1.166.714	583.357	583.357	583.357	583.357	583.357	583.357	8.167.000
		<b>BELANJA BARANG</b>	150.000	435.611	352.100	1.325.195	1.219.296	794.439	846.104	648.817	768.619	694.496	585.823	745.283	8.565.780
		<b>BELANJA MODAL</b>	0	50.000	50.000	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	113.500
032.07.FD.2362		Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	0	165.000	109.000	808.626	841.972	445.005	394.722	351.532	400.916	307.826	297.389	228.011	4.350.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	115.000	59.000	795.126	841.972	445.005	394.722	351.532	400.916	307.826	297.389	228.011	4.236.500
		53 BELANJA MODAL	0	50.000	50.000	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	113.500
032.07.HB.2365		Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000	200.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000	200.000
032.07.HB.2366		Penataan Ruang Laut	0	55.516	55.516	167.610	150.740	61.850	61.850	61.850	61.850	61.850	61.850	74.517	875.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	55.516	55.516	167.610	150.740	61.850	61.850	61.850	61.850	61.850	61.850	74.517	875.000
032.07.WA.2367		Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	733.357	848.451	1.404.298	895.815	809.940	1.404.298	972.889	818.792	839.210	908.177	809.940	976.112	11.421.280
		51 BELANJA PEGAWAI	583.357	583.357	1.166.714	583.357	583.357	1.166.714	583.357	583.357	583.357	583.357	583.357	583.357	8.167.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	150.000	265.094	237.583	312.458	226.583	237.583	389.532	235.435	255.852	324.820	226.583	392.755	3.254.280

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:2409-0063-9790-1350

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

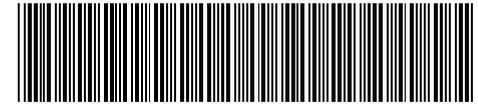
Halaman : III. 2  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>PERKIRAAN PENERIMAAN</b>	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.800.000
		- PNB (425259)	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	903.420
		- PNB (425629)	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	896.580

Jakarta, 02 Desember 2024  
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan  
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.  
Victor Gustaaf Manoppo  
NRP. 69030175

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
IV A. B L O K I R**



DS:2409-0063-9790-1350

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT  
Kode dan Nama Satker : [477425] BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
<b>477425</b>	<b>BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK</b>	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel(PNBP)
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 5.597.848		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.800
	52 Belanja Barang Rp. 5.484.348		belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	53 Belanja Modal Rp. 113.500	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
<b>032.07.FD</b>	<b>Program Kualitas Lingkungan Hidup</b>	522141	Belanja Sewa(PNBP)
<b>2362</b>	<b>Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan</b>		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 65.400
<b>2362.PBW</b>	<b>Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan</b>		belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	521211 Belanja Bahan(PNBP)	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 32.708	522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 24.300
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 145.392	522191	Belanja Jasa Lainnya(PNBP)
	Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 161.712
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.900	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.207.790
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
<b>2362.PCA</b>	<b>Perizinan Produk</b>	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(PNBP)	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 17.640		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 75.900
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PNBP)	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 81.250		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.540
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
IV A. B L O K I R**



DS:2409-0063-9790-1350

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT  
Kode dan Nama Satker : [477425] BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : IV.A. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
2362.PEE	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 100.260 Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	<b>Kemitraan</b>		522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 47.700 belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	521211 Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 29.424 belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 120.656 belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.800 belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 537.354 Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
2362.QMA	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 93.696 Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	2362.RAL	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 165.240 Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.080 Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		<b>Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan</b>
	<b>Data dan Informasi Publik</b>		532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 113.500 belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	521211 Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 274.268 belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		2362.REB
522141 Belanja Sewa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 66.000 belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		521211 Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 111.042 belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	522141 Belanja Sewa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 60.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
IV A. B L O K I R**



DS:2409-0063-9790-1350

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT  
Kode dan Nama Satker : [477425] BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : IV.A. 3  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
<b>2362.SCC</b>	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP	<b>032.07.HB 2365 2365.PBW</b>	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)		522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 34.100		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 75.000
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 58.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 197.080
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 275.888		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 50.340
Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP	Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)			
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 33.660			
Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP			
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
<b>2362.SCC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan</b>			
521211 Belanja Bahan(PNBP)	521211 Belanja Bahan(PNBP)		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.380	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.700		
belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
522141 Belanja Sewa(PNBP)	522141 Belanja Sewa(PNBP)		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.000	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 25.000		
belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.200	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 163.200		
	Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
IV A. B L O K I R**



DS:2409-0063-9790-1350

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT  
Kode dan Nama Satker : [477425] BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

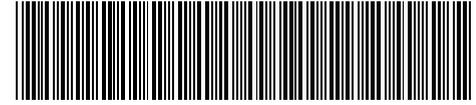
Halaman : IV.A. 4  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
2366 2366.PBT	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.100 Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	032.07.WA 2367 2367.EBA 2367.EBC 2367.EBD	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 40.260 Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	<b>Penataan Ruang Laut</b>		<b>Program Dukungan Manajemen</b>
	<b>Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan</b>		<b>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut</b>
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.520 belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>
	521211 Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.900 belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 77.800 Arahan Presiden dalam sidang kabinet Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522141 Belanja Sewa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 96.000 belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		<b>Layanan Manajemen SDM Internal</b>
	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.600 belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 26.137 Arahan Presiden dalam sidang kabinet Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 685.970 Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 29.750 Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 68.911 Arahan Presiden dalam sidang kabinet Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Jakarta, 02 Desember 2024  
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan  
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.  
Victor Gustaaf Manoppo  
NRP. 69030175

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
IV B. C A T A T A N**



DS:2409-0063-9790-1350

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT  
Kode dan Nama Satker : [477425] BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024  
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan  
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.  
Victor Gustaaf Manoppo  
NRP. 69030175



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN



EKONOMI BIRU **UNTUK**  
INDONESIA EMAS

# DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TAHUN 2025

## DIPA PETIKAN REVISI KE 01

### BPSPL PONTIANAK

## 2025



**BPSPL  
PONTIANAK**  
DIREKTORAT SENDERAL  
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN  
RUANG LAUT



BPSPL Pontianak





**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 032.07.2.477425/2025**



DS:0232-7685-3382-4199

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

**Revisi ke 01**

Tanggal : 23 Februari 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2. Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
3. Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
4. Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK
- Sebesar : Rp. 16.846.280.000 ( ENAM BELAS MILIAR DELAPAN RATUS EMPAT PULUH ENAM JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

**Terlampir**

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

**Terlampir**

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	11.421.280.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	5.425.000.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PONTIANAK (042) Rp. 16.846.280.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
SUAHASIL NAZARA  
NIP. 197011231999031006

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025**



DS:0232-7685-3382-4199

Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

---

04	EKONOMI	Rp.	11.621.280.000
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	Rp.	11.621.280.000
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp.	5.225.000.000
05.04	KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	Rp.	5.225.000.000

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025**



DS:0232-7685-3382-4199

Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	Rp.	4.350.000.000
FD.2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	Rp.	4.350.000.000
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Rp.	1.075.000.000
HB.2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp.	200.000.000
HB.2366	Penataan Ruang Laut	Rp.	875.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	11.421.280.000
WA.2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Rp.	11.421.280.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0232-7685-3382-4199

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : I A. 1

Program	:	032.07.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup				4.350.000.000	
Kegiatan	:	2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan				4.350.000.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jejaring, Kemitraan, Kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati laut yang diimplementasikan					
		2. 01	Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan					
		3. 01	Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan					
		4. 01	Luas Kawasan Konservasi Baru					
		5. 01	Luas kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau- pulau kecil yang operasional (Kumulatif)					
		6. 01	Luas kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (kumulatif)					
		7. 02	Kelompok Penggerak konservasi yang mendukung Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut					
		8. 02	Luas Kawasan Konservasi yang Efektif Dikelola (kumulatif)					
		9. 03	Tingkat Kinerja Pengelolaan Kawasan Konservasi (%)					
		10. 04	Tingkat Kinerja Pengelolaan Konservasi Biota Perairan (25 jenis) (%)					
Klasifikasi Rincian Output	1	:	2362.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		2,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	200.000.000
Rincian Output		:	01 PBW.001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi Ekosistem (PN)		2,00	Rekomendasi Kebijakan	200.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	2362.PCA	Perizinan Produk		5,00	Produk, Keputusan	1.752.592.000
Rincian Output		:	01 PCA.002	Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan		5,00	Produk	1.752.592.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	2362.PEE	Kemitraan		1,00	Kesepakatan	150.000.000
Rincian Output		:	01 PEE.001	Kerjasama, Jejaring dan Kemitraan Konservasi Ekosistem (PN)		1,00	Kesepakatan	150.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0232-7685-3382-4199

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	4	:	2362.QMA	Data dan Informasi Publik		5,00	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah,	1.211.218.000
Rincian Output		:	01	QMA.001	Data dan Informasi Konservasi Ekosistem (PN)	1.00	Peta, Data, Lokasi dokumen	661.218.000
		:	02	QMA.002	Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan	4.00	dokumen	550.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	2362.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan		5,00	Unit	113.500.000
Rincian Output		:	01	RAL.001	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Ekosistem (PN)	5,00	Unit	113.500.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	2362.REB	Konservasi Jenis/Spesies		2,00	Jenis	572.690.000
Rincian Output		:	01	REB.001	Konservasi Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendic Cites (kumulatif) (PN)	2,00	Jenis	572.690.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	2362.SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan		39,00	Orang, Kegiatan	350.000.000
Rincian Output		:	01	SCC.001	Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya (PN)	15,00	Orang	100.000.000
		:	02	SCC.002	Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Kompetensinya (PN)	24,00	Orang	250.000.000
Program		:	032.07.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				1.075.000.000
Kegiatan		:	2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				200.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/ Terluar yang diberikan bantuan sarana ekonomi produktif (kelompok)				
		:	2. 01	Pesisir dan pulau - pulau kecil / terluar yang dibangun sarana prasaranannya				
		:	3. 01	Pulau - pulau kecil/terluar yang dikelola dan/atau difasilitasi pemanfaatannya				
		:	4. 01	Pulau-pulau kecil yang dimanfaatkan dan ditingkatkan nilai investasinya (pulau) (kumulatif)				
		:	5. 02	Nilai Kemandirian Masyarakat Hukum Adat (Nilai)				
		:	6. 02	Pulau-pulau kecil terluar yang meningkat aksesibilitasnya (Pulau) (kumulatif)				

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0232-7685-3382-4199

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	1	:	2365.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	200.000.000
Rincian Output		:	01 PBW.001	Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar (PN)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	200.000.000
Kegiatan		:	2366	Penataan Ruang Laut			875.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Perairan laut antar wilayah yang memiliki Rencana Zonasi Kawasan Antar wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan			
			2. 01	Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar wilayah (RZ KAW)			
			3. 01	Persentase Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang diterbitkan			
			4. 01	Provinsi yang memiliki dokumen monitoring evaluasi/kajian peninjauan kembali/peraturan turunan peraturan daerah rencana zonasi WP3K			
			5. 02	Kawasan Strategis Nasional yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN)			
			6. 02	Persentase KKPRL yang dimonitoring dan evaluasi (%)			
			7. 03	Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)			
			8. 04	Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun			
			9. 05	Perairan KSNT Non PPKT yang memiliki Rencana Zonasi ditetapkan melalui Peraturan Perundangan			
			10. 06	Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)			
Klasifikasi Rincian Output	2	:	2366.PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Materi Teknis, Dokumen	875.000.000
Rincian Output		:	01 PBT.009	Rekomendasi kebijakan verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang beresiko rendah (PN)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	875.000.000
Program		:	032.07.WA	Program Dukungan Manajemen			11.421.280.000
Kegiatan		:	2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut			11.421.280.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 12	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPKRL			
			2. 14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL			
			3. 15	Presentase Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPKRL			
			4. 16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0232-7685-3382-4199

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	1	:	2367.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	8,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	11.140.980.000
Rincian Output		:	01	EBA.956 Layanan BMN	4.00	Layanan	35.780.000
			02	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	45.300.000
			03	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	64.000.000
			04	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	109.900.000
			05	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	10.886.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	2367.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	30,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	83.900.000
Rincian Output		:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	30.00	Orang	83.900.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	2367.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	196.400.000
Rincian Output		:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00	Dokumen	60.000.000
			02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.00	Dokumen	80.100.000
			03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Dokumen	56.300.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan  
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

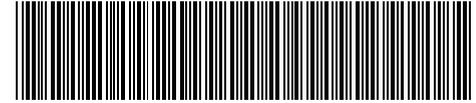
ttd.  
Victor Gustaaf Manoppo  
NRP. 69030175

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

**NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025**

**I B. SUMBER DANA**



DS:0232-7685-3382-4199

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
 Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
 Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

			<b>Pagu</b>		<b>Ekuivalen Rupiah</b>	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	16.846.280.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	11.421.280.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.	5.425.000.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0232-7685-3382-4199

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	8.167.000	8.565.780	113.500	-	-	16.846.280		
032.07.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	-	4.236.500	113.500	-	-	4.350.000		
2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	-	4.236.500	113.500	-	-	4.350.000		
2362.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	200.000	-	-	-	200.000	13 . 51	
04	PNBP	-	200.000	-	-	-	200.000	042@	
2362.PCA	Perizinan Produk (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	1.752.592	-	-	-	1.752.592	13 . 51	
04	PNBP	-	1.752.592	-	-	-	1.752.592	042@	
2362.PEE	Kemitraan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	150.000	-	-	-	150.000	13 . 51	
04	PNBP	-	150.000	-	-	-	150.000	042@	
2362.QMA	Data dan Informasi Publik (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	1.211.218	-	-	-	1.211.218	13 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0232-7685-3382-4199

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 PNPB		-	1.211.218	-	-	-	1.211.218	042@	
2362.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	-	113.500	-	-	113.500	13 . 51	
04 PNPB		-	-	113.500	-	-	113.500	042@	
2362.REB	Konservasi Jenis/Spesies (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	572.690	-	-	-	572.690	13 . 51	
04 PNPB		-	572.690	-	-	-	572.690	042@	
2362.SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	350.000	-	-	-	350.000	13 . 51	
04 PNPB		-	350.000	-	-	-	350.000	042@	
<b>032.07.HB</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</b>	-	<b>1.075.000</b>	-	-	-	<b>1.075.000</b>		
<b>2365</b>	<b>Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	-	<b>200.000</b>	-	-	-	<b>200.000</b>		
2365.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	200.000	-	-	-	200.000	13 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



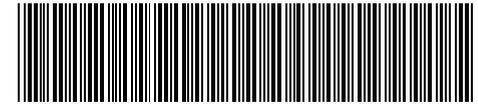
DS:0232-7685-3382-4199

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 3  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	PNBP	-	200.000	-	-	-	200.000	042@	
<b>2366</b>	<b>Penataan Ruang Laut</b>	-	<b>875.000</b>	-	-	-	<b>875.000</b>		
2366.PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	875.000	-	-	-	875.000	13 . 51	
04	PNBP	-	875.000	-	-	-	875.000	042@	
<b>032.07.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>8.167.000</b>	<b>3.254.280</b>	-	-	-	<b>11.421.280</b>		
<b>2367</b>	<b>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut</b>	<b>8.167.000</b>	<b>3.254.280</b>	-	-	-	<b>11.421.280</b>		
2367.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	8.167.000	2.973.980	-	-	-	11.140.980	13 . 51	
01	RM	8.167.000	2.973.980	-	-	-	11.140.980	042@	
2367.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	83.900	-	-	-	83.900	13 . 51	
01	RM	-	83.900	-	-	-	83.900	042@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0232-7685-3382-4199

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 4  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2367.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	196.400	-	-	-	196.400	13 . 51	
01 RM		-	196.400	-	-	-	196.400	042@	
<b>JUMLAH</b>		<b>8.167.000</b>	<b>8.565.780</b>	<b>113.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.846.280</b>		

Jakarta, 02 Desember 2024  
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan  
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.  
Victor Gustaaf Manoppo  
NRP. 69030175



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0232-7685-3382-4199

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : III. 2  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		- PNBP (425259)	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	903.420
		- PNBP (425629)	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	896.580

Jakarta, 02 Desember 2024  
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan  
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.  
Victor Gustaaf Manoppo  
NRP. 69030175

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
IV A. B L O K I R**



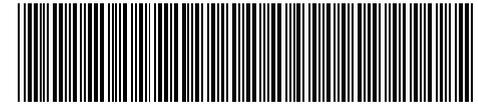
DS:0232-7685-3382-4199

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT  
Kode dan Nama Satker : [477425] BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
<b>477425</b>	<b>BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK</b>		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 5.561.356	522141	Belanja Sewa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 50.400
	52 Belanja Barang Rp. 5.447.856		belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	53 Belanja Modal Rp. 113.500	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
<b>032.07.FD</b>	<b>Program Kualitas Lingkungan Hidup</b>	522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 24.300
<b>2362</b>	<b>Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan</b>		belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
<b>2362.PBW</b>	<b>Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan</b>	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	521211 Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 32.708	522191	Belanja Jasa Lainnya(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 172.172
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 145.392	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.231.646
	Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.900	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 48.900
	Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
<b>2362.PCA</b>	<b>Perizinan Produk</b>	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.540
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.560		Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 100.260
	521211 Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 104.814		Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
IV A. B L O K I R**



DS:0232-7685-3382-4199

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT  
Kode dan Nama Satker : [477425] BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : IV.A. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN	
<b>2362.PEE</b>	<b>Kemitraan</b>		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 29.424		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 127.224	
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP	
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	
	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.800		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 638.358	
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)	
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 93.696	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 128.690			
Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)	<b>2362.RAL</b> <b>Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan</b>	532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(PNBP)		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.080		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 113.500		
Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
<b>2362.QMA</b>		<b>Data dan Informasi Publik</b>	<b>2362.REB</b> <b>Konservasi Jenis/Spesies</b>	521211 Belanja Bahan(PNBP)
		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 215.846		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 112.442
		belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
		522141 Belanja Sewa(PNBP)		522141 Belanja Sewa(PNBP)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 66.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 128.000		
belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait			
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait			
522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)			
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 35.100	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.000			
belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP				

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
IV A. B L O K I R**



DS:0232-7685-3382-4199

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT  
Kode dan Nama Satker : [477425] BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : IV.A. 3  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
2362.SCC	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	032.07.HB 2365 2365.PBW	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 197.080
	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 235.848		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 50.340
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)	<b>Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</b>		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.160	<b>Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>		
Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP	<b>Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan</b>		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	521211 Belanja Bahan(PNBP)		
521211 Belanja Bahan(PNBP)	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.200		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.380	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	522141 Belanja Sewa(PNBP)		
522141 Belanja Sewa(PNBP)	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 25.000		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.000	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		
522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 166.260		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.200	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		
522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.040		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 75.000	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
IV A. B L O K I R**



DS:0232-7685-3382-4199

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT  
Kode dan Nama Satker : [477425] BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : IV.A. 4  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
<b>2366</b>	<b>Penataan Ruang Laut</b>		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
<b>2366.PBT</b>	<b>Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan</b>	<b>032.07.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(PNBP)	<b>2367</b>	<b>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut</b>
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.520	<b>2367.EBA</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>
	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 105.040
521211	Belanja Bahan(PNBP)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 88.900	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.600
522141	Belanja Sewa(PNBP)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 24.000	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	<b>2367.EBC</b>	<b>Layanan Manajemen SDM Internal</b>
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 36.300
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.600		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNB	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	<b>2367.EBD</b>	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 677.280		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 71.156
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 23.800		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 54.900		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024  
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan  
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.  
Victor Gustaaf Manoppo  
NRP. 69030175

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
IV B. C A T A T A N**



DS:0232-7685-3382-4199

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT  
Kode dan Nama Satker : [477425] BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024  
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan  
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.  
Victor Gustaaf Manoppo  
NRP. 69030175



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

KKP  
2025

panganbiru

08  
POVERTY GROWTH

EKONOMI BIRU **UNTUK**  
INDONESIA EMAS

# DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TAHUN 2025

## DIPA PETIKAN REVISI KE 02

### BPSPL PONTIANAK

## 2025



**BPSPL  
PONTIANAK**  
DIREKTORAT SENDERAL  
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN  
RUANG LAUT



BPSPL Pontianak



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 032.07.2.477425/2025**



DS:9474-4515-0420-0784

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

**Revisi ke 02**

Tanggal : 10 April 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2. Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
3. Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
4. Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK
- Sebesar : Rp. 16.846.280.000 ( ENAM BELAS MILIAR DELAPAN RATUS EMPAT PULUH ENAM JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

**Terlampir**

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

**Terlampir**

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	11.421.280.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	5.425.000.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PONTIANAK (042) Rp. 16.846.280.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
SUAHASIL NAZARA  
NIP. 197011231999031006

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025**



DS:9474-4515-0420-0784

Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

---

04	EKONOMI	Rp.	11.621.280.000
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	Rp.	11.621.280.000
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp.	5.225.000.000
05.04	KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	Rp.	5.225.000.000

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025**



DS:9474-4515-0420-0784

Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	Rp.	4.350.000.000
FD.2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	Rp.	4.350.000.000
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Rp.	1.075.000.000
HB.2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp.	200.000.000
HB.2366	Penataan Ruang Laut	Rp.	875.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	11.421.280.000
WA.2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Rp.	11.421.280.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9474-4515-0420-0784

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : I A. 1

Program	:	032.07.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup				4.350.000.000
Kegiatan	:	2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan				4.350.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output 1	:	2362.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		2,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	200.000.000
Rincian Output	:	01 PBW.001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi Ekosistem (PN)		2,00	Rekomendasi Kebijakan	200.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	2362.PCA	Perizinan Produk		5,00	Produk, Keputusan	1.752.592.000
Rincian Output	:	01 PCA.002	Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan		5,00	Produk	1.752.592.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	2362.PEE	Kemitraan		1,00	Kesepakatan	150.000.000
Rincian Output	:	01 PEE.001	Kerjasama, Jejaring dan Kemitraan Konservasi Ekosistem (PN)		1,00	Kesepakatan	150.000.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	2362.QMA	Data dan Informasi Publik		5,00	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	1.211.218.000
Rincian Output	:	01 QMA.001	Data dan Informasi Konservasi Ekosistem (PN)		1,00	dokumen	661.218.000
		02 QMA.002	Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan		4,00	dokumen	550.000.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	2362.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan		5,00	Unit	113.500.000
Rincian Output	:	01 RAL.001	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Ekosistem (PN)		5,00	Unit	113.500.000
Klasifikasi Rincian Output 6	:	2362.REB	Konservasi Jenis/Spesies		2,00	Jenis	572.690.000
Rincian Output	:	01 REB.001	Konservasi Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendic Cites (kumulatif) (PN)		2,00	Jenis	572.690.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



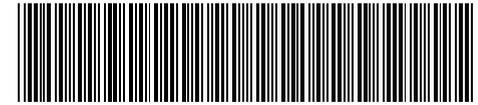
DS:9474-4515-0420-0784

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : I A. 2

Konservasi Jenis/Spesies				Jenis		
Klasifikasi Rincian Output	7	2362.SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	39,00	Orang, Kegiatan	350.000.000
Rincian Output		01 SCC.001	Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya (PN)	15,00	Orang	100.000.000
		02 SCC.002	Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Kompetensinya (PN)	24,00	Orang	250.000.000
Program		032.07.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			1.075.000.000
Kegiatan		2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			200.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan						
Klasifikasi Rincian Output	1	2365.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	200.000.000
Rincian Output		01 PBW.001	Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar (PN)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	200.000.000
Kegiatan		2366	Penataan Ruang Laut			875.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	2366.PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Materi Teknis, Dokumen	875.000.000
Rincian Output		01 PBT.009	Rekomendasi kebijakan verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang beresiko rendah (PN)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	875.000.000
Program		032.07.WA	Program Dukungan Manajemen			11.421.280.000
Kegiatan		2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut			11.421.280.000
Indikator Kinerja Kegiatan						

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9474-4515-0420-0784

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	1	:	2367.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	8,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	11.140.980.000
Rincian Output		:	01	EBA.956 Layanan BMN	4.00	Layanan	35.780.000
		:	02	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	45.300.000
		:	03	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	64.000.000
		:	04	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	109.900.000
		:	05	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	10.886.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	2367.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	30,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	83.900.000
Rincian Output		:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	30.00	Orang	83.900.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	2367.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	196.400.000
Rincian Output		:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00	Dokumen	60.000.000
		:	02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.00	Dokumen	80.100.000
		:	03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Dokumen	56.300.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan  
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

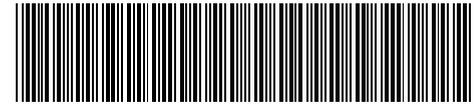
ttd.  
Victor Gustaaf Manoppo  
NRP. 69030175

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025

I B. SUMBER DANA



DS:9474-4515-0420-0784

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
 Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
 Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	16.846.280.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	11.421.280.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9474-4515-0420-0784

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	8.167.000	8.565.780	113.500	-	-	16.846.280		
032.07.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	-	4.236.500	113.500	-	-	4.350.000		
2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	-	4.236.500	113.500	-	-	4.350.000		
2362.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	200.000	-	-	-	200.000	13 . 51	
04	PNBP	-	200.000	-	-	-	200.000	042@	
2362.PCA	Perizinan Produk (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	1.752.592	-	-	-	1.752.592	13 . 51	
04	PNBP	-	1.752.592	-	-	-	1.752.592	042@	
2362.PEE	Kemitraan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	150.000	-	-	-	150.000	13 . 51	
04	PNBP	-	150.000	-	-	-	150.000	042@	
2362.QMA	Data dan Informasi Publik (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	1.211.218	-	-	-	1.211.218	13 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



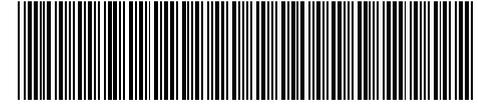
DS:9474-4515-0420-0784

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 PNPB		-	1.211.218	-	-	-	1.211.218	042@	
2362.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	-	113.500	-	-	113.500	13 . 51	
04 PNPB		-	-	113.500	-	-	113.500	042@	
2362.REB	Konservasi Jenis/Spesies (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	572.690	-	-	-	572.690	13 . 51	
04 PNPB		-	572.690	-	-	-	572.690	042@	
2362.SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	350.000	-	-	-	350.000	13 . 51	
04 PNPB		-	350.000	-	-	-	350.000	042@	
<b>032.07.HB</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</b>	-	<b>1.075.000</b>	-	-	-	<b>1.075.000</b>		
<b>2365</b>	<b>Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	-	<b>200.000</b>	-	-	-	<b>200.000</b>		
2365.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	200.000	-	-	-	200.000	13 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9474-4515-0420-0784

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 3  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	PNBP	-	200.000	-	-	-	200.000	042@	
<b>2366</b>	<b>Penataan Ruang Laut</b>	-	<b>875.000</b>	-	-	-	<b>875.000</b>		
2366.PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	875.000	-	-	-	875.000	13 . 51	
04	PNBP	-	875.000	-	-	-	875.000	042@	
<b>032.07.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>8.167.000</b>	<b>3.254.280</b>	-	-	-	<b>11.421.280</b>		
<b>2367</b>	<b>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut</b>	<b>8.167.000</b>	<b>3.254.280</b>	-	-	-	<b>11.421.280</b>		
2367.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	8.167.000	2.973.980	-	-	-	11.140.980	13 . 51	
01	RM	8.167.000	2.973.980	-	-	-	11.140.980	042@	
2367.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	83.900	-	-	-	83.900	13 . 51	
01	RM	-	83.900	-	-	-	83.900	042@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9474-4515-0420-0784

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 4  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2367.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	196.400	-	-	-	196.400	13 . 51	
01 RM		-	196.400	-	-	-	196.400	042@	
<b>JUMLAH</b>		<b>8.167.000</b>	<b>8.565.780</b>	<b>113.500</b>	-	-	<b>16.846.280</b>		

Jakarta, 02 Desember 2024  
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan  
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.  
Victor Gustaaf Manoppo  
NRP. 69030175



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9474-4515-0420-0784

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
 Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
 Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

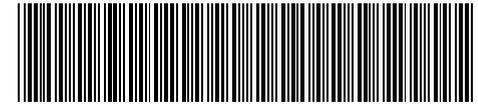
Halaman : III. 2  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		- PNBP (425259)	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	903.420
		- PNBP (425629)	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	896.580

Jakarta, 02 Desember 2024  
 a.n Menteri Kelautan dan Perikanan  
 Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.  
 Victor Gustaaf Manoppo  
 NRP. 69030175

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
IV A. B L O K I R**



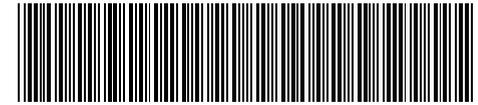
DS:9474-4515-0420-0784

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT  
Kode dan Nama Satker : [477425] BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
<b>477425</b>	<b>BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK</b>	522141	Belanja Sewa(PNBP)
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 5.641.096		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 50.400
	52 Belanja Barang Rp. 5.527.596		belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	53 Belanja Modal Rp. 113.500	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
<b>032.07.FD</b>	<b>Program Kualitas Lingkungan Hidup</b>	522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)
<b>2362</b>	<b>Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan</b>		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 24.300
<b>2362.PBW</b>	<b>Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan</b>		belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	521211 Belanja Bahan(PNBP)	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 32.708	522191	Belanja Jasa Lainnya(PNBP)
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 172.172
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 145.392	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.231.646
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.900	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
	Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 48.900
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
<b>2362.PCA</b>	<b>Perizinan Produk</b>	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(PNBP)	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.560		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.540
	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521211	Belanja Bahan(PNBP)	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 104.814		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 100.260
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
IV A. B L O K I R**



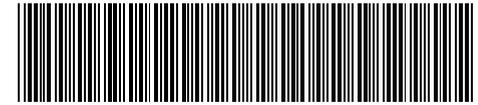
DS:9474-4515-0420-0784

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT  
Kode dan Nama Satker : [477425] BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : IV.A. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
<b>2362.PEE</b>	<b>Kemitraan</b>		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 29.424		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 127.224
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.800		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 638.358
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 93.696	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 128.690		
Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP	Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)	<b>2362.RAL</b>	<b>Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan</b>	
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.080		532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(PNBP)	
Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 113.500	Tidak Dapat Dicairkan	
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
<b>2362.QMA</b>	<b>Data dan Informasi Publik</b>		<b>2362.REB</b>
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		<b>Konservasi Jenis/Spesies</b>
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 215.846		521211 Belanja Bahan(PNBP)
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 118.142
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
522141 Belanja Sewa(PNBP)	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 66.000	522141 Belanja Sewa(PNBP)		
belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 134.000		
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		
522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 35.100	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)		
belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.000		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
IV A. B L O K I R**



DS:9474-4515-0420-0784

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT  
Kode dan Nama Satker : [477425] BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : IV.A. 3  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
2362.SCC	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	032.07.HB 2365 2365.PBW	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 197.080
	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 297.988		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 50.340
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)		<b>Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</b>
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 11.560		<b>Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>
belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP	<b>Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan</b>		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	521211 Belanja Bahan(PNBP)		
521211 Belanja Bahan(PNBP)	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.700		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.380	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		
belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	522141 Belanja Sewa(PNBP)		
522141 Belanja Sewa(PNBP)	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 25.000		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.000	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		
522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 166.260		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.200	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		
522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.040		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 75.000	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
IV A. B L O K I R**



DS:9474-4515-0420-0784

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT  
Kode dan Nama Satker : [477425] BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : IV.A. 4  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
<b>2366</b>	<b>Penataan Ruang Laut</b>		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
<b>2366.PBT</b>	<b>Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan</b>	<b>032.07.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(PNBP)	<b>2367</b>	<b>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut</b>
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.520	<b>2367.EBA</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>
	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 105.040
521211	Belanja Bahan(PNBP)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 88.900	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.600
522141	Belanja Sewa(PNBP)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 24.000	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	<b>2367.EBC</b>	<b>Layanan Manajemen SDM Internal</b>
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 36.300
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.600		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNPB	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	<b>2367.EBD</b>	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 677.280		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 71.156
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 23.800		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 54.900		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024  
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan  
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.  
Victor Gustaaf Manoppo  
NRP. 69030175

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
IV B. C A T A T A N**



DS:9474-4515-0420-0784

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT  
Kode dan Nama Satker : [477425] BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024  
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan  
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.  
Victor Gustaaf Manoppo  
NRP. 69030175



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN



EKONOMI BIRU **UNTUK**  
INDONESIA EMAS

# DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TAHUN 2025

## DIPA PETIKAN REVISI KE 03

### BPSPL PONTIANAK

## 2025



**BPSPL  
PONTIANAK**  
DIREKTORAT SENDERAL  
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN  
RUANG LAUT



BPSPL Pontianak





**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 032.07.2.477425/2025**



DS:9474-4515-0420-0784

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

**Revisi ke 03**

Tanggal : 22 April 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2. Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
3. Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
4. Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK
- Sebesar : Rp. 16.846.280.000 ( ENAM BELAS MILIAR DELAPAN RATUS EMPAT PULUH ENAM JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

**Terlampir**

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

**Terlampir**

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	11.421.280.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	5.425.000.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PONTIANAK (042) Rp. 16.846.280.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
SUAHASIL NAZARA  
NIP. 197011231999031006

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025**



DS:9474-4515-0420-0784

Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

---

04	EKONOMI	Rp.	11.621.280.000
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	Rp.	11.621.280.000
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp.	5.225.000.000
05.04	KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	Rp.	5.225.000.000

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025**



DS:9474-4515-0420-0784

Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	Rp.	4.350.000.000
FD.2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	Rp.	4.350.000.000
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Rp.	1.075.000.000
HB.2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp.	200.000.000
HB.2366	Penataan Ruang Laut	Rp.	875.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	11.421.280.000
WA.2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Rp.	11.421.280.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



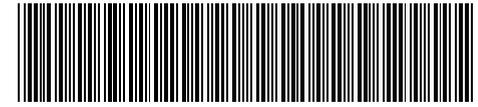
DS:9474-4515-0420-0784

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : I A. 1

Program	:	032.07.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup				4.350.000.000
Kegiatan	:	2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan				4.350.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output 1	:	2362.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		2,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	200.000.000
Rincian Output	:	01 PBW.001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi Ekosistem (PN)		2,00	Rekomendasi Kebijakan	200.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	2362.PCA	Perizinan Produk		5,00	Produk, Keputusan	1.752.592.000
Rincian Output	:	01 PCA.002	Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan		5,00	Produk	1.752.592.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	2362.PEE	Kemitraan		1,00	Kesepakatan	150.000.000
Rincian Output	:	01 PEE.001	Kerjasama, Jejaring dan Kemitraan Konservasi Ekosistem (PN)		1,00	Kesepakatan	150.000.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	2362.QMA	Data dan Informasi Publik		5,00	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	1.211.218.000
Rincian Output	:	01 QMA.001	Data dan Informasi Konservasi Ekosistem (PN)		1,00	dokumen	661.218.000
		02 QMA.002	Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan		4,00	dokumen	550.000.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	2362.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan		5,00	Unit	113.500.000
Rincian Output	:	01 RAL.001	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Ekosistem (PN)		5,00	Unit	113.500.000
Klasifikasi Rincian Output 6	:	2362.REB	Konservasi Jenis/Spesies		2,00	Jenis	572.690.000
Rincian Output	:	01 REB.001	Konservasi Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendic Cites (kumulatif) (PN)		2,00	Jenis	572.690.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



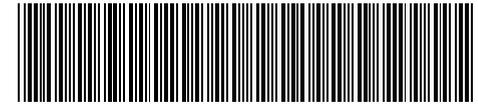
DS:9474-4515-0420-0784

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : I A. 2

Konservasi Jenis/Spesies				Jenis		
Klasifikasi Rincian Output	7	2362.SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	39,00	Orang, Kegiatan	350.000.000
Rincian Output		01 SCC.001	Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya (PN)	15,00	Orang	100.000.000
		02 SCC.002	Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Kompetensinya (PN)	24,00	Orang	250.000.000
Program		032.07.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			1.075.000.000
Kegiatan		2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			200.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan						
Klasifikasi Rincian Output	1	2365.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	200.000.000
Rincian Output		01 PBW.001	Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar (PN)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	200.000.000
Kegiatan		2366	Penataan Ruang Laut			875.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	2366.PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Materi Teknis, Dokumen	875.000.000
Rincian Output		01 PBT.009	Rekomendasi kebijakan verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang beresiko rendah (PN)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	875.000.000
Program		032.07.WA	Program Dukungan Manajemen			11.421.280.000
Kegiatan		2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut			11.421.280.000
Indikator Kinerja Kegiatan						

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9474-4515-0420-0784

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	1	:	2367.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	8,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	11.140.980.000
Rincian Output		:	01	EBA.956 Layanan BMN	4.00	Layanan	35.780.000
		:	02	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	45.300.000
		:	03	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	64.000.000
		:	04	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	109.900.000
		:	05	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	10.886.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	2367.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	30,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	83.900.000
Rincian Output		:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	30.00	Orang	83.900.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	2367.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	196.400.000
Rincian Output		:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00	Dokumen	60.000.000
		:	02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.00	Dokumen	80.100.000
		:	03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Dokumen	56.300.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan  
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.  
Victor Gustaaf Manoppo  
NRP. 69030175

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

**NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025**

**I B. SUMBER DANA**



DS:9474-4515-0420-0784

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
 Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
 Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : I B. 1

		Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	16.846.280.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	11.421.280.000		(2) RPLN US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9474-4515-0420-0784

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	8.167.000	8.565.780	113.500	-	-	16.846.280		
032.07.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	-	4.236.500	113.500	-	-	4.350.000		
2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	-	4.236.500	113.500	-	-	4.350.000		
2362.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	200.000	-	-	-	200.000	13 . 51	
04	PNBP	-	200.000	-	-	-	200.000	042@	
2362.PCA	Perizinan Produk (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	1.752.592	-	-	-	1.752.592	13 . 51	
04	PNBP	-	1.752.592	-	-	-	1.752.592	042@	
2362.PEE	Kemitraan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	150.000	-	-	-	150.000	13 . 51	
04	PNBP	-	150.000	-	-	-	150.000	042@	
2362.QMA	Data dan Informasi Publik (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	1.211.218	-	-	-	1.211.218	13 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9474-4515-0420-0784

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 PNPB		-	1.211.218	-	-	-	1.211.218	042@	
2362.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	-	113.500	-	-	113.500	13 . 51	
04 PNPB		-	-	113.500	-	-	113.500	042@	
2362.REB	Konservasi Jenis/Spesies (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	572.690	-	-	-	572.690	13 . 51	
04 PNPB		-	572.690	-	-	-	572.690	042@	
2362.SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	350.000	-	-	-	350.000	13 . 51	
04 PNPB		-	350.000	-	-	-	350.000	042@	
<b>032.07.HB</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</b>	-	<b>1.075.000</b>	-	-	-	<b>1.075.000</b>		
<b>2365</b>	<b>Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	-	<b>200.000</b>	-	-	-	<b>200.000</b>		
2365.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	200.000	-	-	-	200.000	13 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9474-4515-0420-0784

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 3  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	PNBP	-	200.000	-	-	-	200.000	042@	
<b>2366</b>	<b>Penataan Ruang Laut</b>	-	<b>875.000</b>	-	-	-	<b>875.000</b>		
2366.PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	875.000	-	-	-	875.000	13 . 51	
04	PNBP	-	875.000	-	-	-	875.000	042@	
<b>032.07.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>8.167.000</b>	<b>3.254.280</b>	-	-	-	<b>11.421.280</b>		
<b>2367</b>	<b>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut</b>	<b>8.167.000</b>	<b>3.254.280</b>	-	-	-	<b>11.421.280</b>		
2367.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	8.167.000	2.973.980	-	-	-	11.140.980	13 . 51	
01	RM	8.167.000	2.973.980	-	-	-	11.140.980	042@	
2367.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	83.900	-	-	-	83.900	13 . 51	
01	RM	-	83.900	-	-	-	83.900	042@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9474-4515-0420-0784

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 4  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
2367.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	196.400	-	-	-	196.400	13 . 51	
01 RM		-	196.400	-	-	-	196.400	042@	
<b>JUMLAH</b>		<b>8.167.000</b>	<b>8.565.780</b>	<b>113.500</b>	-	-	<b>16.846.280</b>		

Jakarta, 02 Desember 2024  
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan  
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.  
Victor Gustaaf Manoppo  
NRP. 69030175



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9474-4515-0420-0784

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

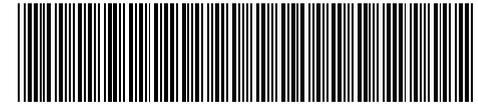
Halaman : III. 2  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		- PNBP (425259)	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	903.420
		- PNBP (425629)	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	896.580

Jakarta, 02 Desember 2024  
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan  
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.  
Victor Gustaaf Manoppo  
NRP. 69030175

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
IV A. B L O K I R**



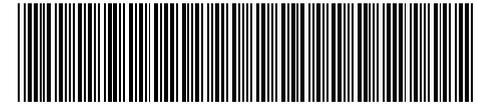
DS:9474-4515-0420-0784

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT  
Kode dan Nama Satker : [477425] BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
<b>477425</b>	<b>BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK</b>	522141	Belanja Sewa(PNBP)
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 5.641.096		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 50.400
	52 Belanja Barang Rp. 5.527.596		belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	53 Belanja Modal Rp. 113.500	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
<b>032.07.FD</b>	<b>Program Kualitas Lingkungan Hidup</b>	522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)
<b>2362</b>	<b>Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan</b>		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 24.300
<b>2362.PBW</b>	<b>Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan</b>		belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	521211 Belanja Bahan(PNBP)	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 32.708	522191	Belanja Jasa Lainnya(PNBP)
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 172.172
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 145.392	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.231.646
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.900	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
	Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 48.900
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
<b>2362.PCA</b>	<b>Perizinan Produk</b>	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(PNBP)	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.560		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.540
	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PNBP)	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 104.814		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 100.260
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
IV A. B L O K I R**



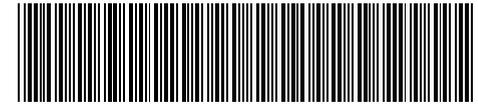
DS:9474-4515-0420-0784

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT  
Kode dan Nama Satker : [477425] BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : IV.A. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN	
<b>2362.PEE</b>	<b>Kemitraan</b>		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 29.424		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 127.224	
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP	
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	
	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.800		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 638.358	
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)	
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 93.696	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 128.690			
Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP	Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP			
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)	<b>2362.RAL</b> <b>Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan</b>	532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(PNBP)		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.080		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 113.500		
Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
<b>2362.QMA</b>		<b>Data dan Informasi Publik</b>	<b>2362.REB</b> <b>Konservasi Jenis/Spesies</b>	521211 Belanja Bahan(PNBP)
		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 215.846		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 118.142
		belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
		522141 Belanja Sewa(PNBP)		522141 Belanja Sewa(PNBP)
		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 66.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 134.000
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 35.100	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.000		
belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP				

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
IV A. B L O K I R**



DS:9474-4515-0420-0784

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT  
Kode dan Nama Satker : [477425] BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : IV.A. 3  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
2362.SCC	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	032.07.HB 2365 2365.PBW	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 197.080
	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 297.988		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 50.340
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)	<b>Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</b>		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 11.560	<b>Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>		
belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP	<b>Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan</b>		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	521211 Belanja Bahan(PNBP)		
521211 Belanja Bahan(PNBP)	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.700		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.380	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		
belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	522141 Belanja Sewa(PNBP)		
522141 Belanja Sewa(PNBP)	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 25.000		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.000	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		
522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 166.260		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.200	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		
522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.040		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 75.000	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
IV A. B L O K I R**



DS:9474-4515-0420-0784

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT  
Kode dan Nama Satker : [477425] BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : IV.A. 4  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
<b>2366</b>	<b>Penataan Ruang Laut</b>		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
<b>2366.PBT</b>	<b>Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan</b>	<b>032.07.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(PNBP)	<b>2367</b>	<b>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut</b>
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.520	<b>2367.EBA</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>
	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 105.040
521211	Belanja Bahan(PNBP)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 88.900	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.600
522141	Belanja Sewa(PNBP)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 24.000	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	<b>2367.EBC</b>	<b>Layanan Manajemen SDM Internal</b>
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 36.300
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.600		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNPB	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	<b>2367.EBD</b>	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 677.280		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 71.156
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 23.800		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 54.900		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024  
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan  
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.  
Victor Gustaaf Manoppo  
NRP. 69030175

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
IV B. C A T A T A N**



DS:9474-4515-0420-0784

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT  
Kode dan Nama Satker : [477425] BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024  
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan  
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.  
Victor Gustaaf Manoppo  
NRP. 69030175



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN



EKONOMI BIRU **UNTUK**  
INDONESIA EMAS

# DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TAHUN 2025

## DIPA PETIKAN REVISI KE 04

### BPSPL PONTIANAK

### 2025



**BPSPL  
PONTIANAK**  
DIREKTORAT SENDERAL  
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN  
RUANG LAUT

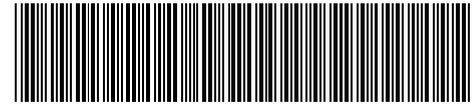


BPSPL Pontianak





**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 032.07.2.477425/2025**



DS:4010-9307-9817-8982

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

**Revisi ke 04**

Tanggal : 17 Juni 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2. Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
3. Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
4. Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK
- Sebesar : Rp. 16.846.280.000 ( ENAM BELAS MILIAR DELAPAN RATUS EMPAT PULUH ENAM JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

**Terlampir**

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

**Terlampir**

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	11.421.280.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	5.425.000.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PONTIANAK (042) Rp. 16.846.280.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
LUKY ALFIRMAN  
NIP. 197003271995031002

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025**



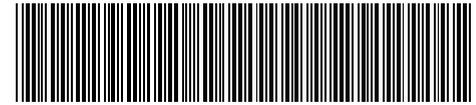
DS:4010-9307-9817-8982

Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

---

04	EKONOMI	Rp.	11.621.280.000
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	Rp.	11.621.280.000
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp.	5.225.000.000
05.04	KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	Rp.	5.225.000.000

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025**



DS:4010-9307-9817-8982

Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	Rp.	4.350.000.000
FD.2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	Rp.	4.350.000.000
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Rp.	1.075.000.000
HB.2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp.	200.000.000
HB.2366	Penataan Ruang Laut	Rp.	875.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	11.421.280.000
WA.2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Rp.	11.421.280.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4010-9307-9817-8982

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : I A. 1

Program	:	032.07.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup				4.350.000.000
Kegiatan	:	2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan				4.350.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output 1	:	2362.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		2,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	200.000.000
Rincian Output	:	01 PBW.001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi Ekosistem (PN)		2,00	Rekomendasi Kebijakan	200.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	2362.PCA	Perizinan Produk		5,00	Produk, Keputusan	1.752.592.000
Rincian Output	:	01 PCA.002	Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan		5,00	Produk	1.752.592.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	2362.PEE	Kemitraan		1,00	Kesepakatan	150.000.000
Rincian Output	:	01 PEE.001	Kerjasama, Jejaring dan Kemitraan Konservasi Ekosistem (PN)		1,00	Kesepakatan	150.000.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	2362.QMA	Data dan Informasi Publik		5,00	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	1.211.218.000
Rincian Output	:	01 QMA.001	Data dan Informasi Konservasi Ekosistem (PN)		1,00	dokumen	661.218.000
		02 QMA.002	Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan		4,00	dokumen	550.000.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	2362.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan		5,00	Unit	113.500.000
Rincian Output	:	01 RAL.001	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Ekosistem (PN)		5,00	Unit	113.500.000
Klasifikasi Rincian Output 6	:	2362.REB	Konservasi Jenis/Spesies		2,00	Jenis	572.690.000
Rincian Output	:	01 REB.001	Konservasi Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendic Cites (kumulatif) (PN)		2,00	Jenis	572.690.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



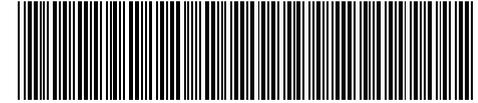
DS:4010-9307-9817-8982

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : I A. 2

Konservasi Jenis/Spesies				Jenis		
Klasifikasi Rincian Output	7	2362.SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	39,00	Orang, Kegiatan	350.000.000
Rincian Output		01 SCC.001	Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya (PN)	15,00	Orang	100.000.000
		02 SCC.002	Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Kompetensinya (PN)	24,00	Orang	250.000.000
Program		032.07.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			1.075.000.000
Kegiatan		2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			200.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan						
Klasifikasi Rincian Output	1	2365.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	200.000.000
Rincian Output		01 PBW.001	Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar (PN)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	200.000.000
Kegiatan		2366	Penataan Ruang Laut			875.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	2366.PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Materi Teknis, Dokumen	875.000.000
Rincian Output		01 PBT.009	Rekomendasi kebijakan verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang beresiko rendah (PN)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	875.000.000
Program		032.07.WA	Program Dukungan Manajemen			11.421.280.000
Kegiatan		2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut			11.421.280.000
Indikator Kinerja Kegiatan						

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4010-9307-9817-8982

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	1	:	2367.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	8,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	11.140.980.000
Rincian Output		:	01	EBA.956 Layanan BMN	4.00	Layanan	35.780.000
			02	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	45.300.000
			03	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	64.000.000
			04	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	109.900.000
			05	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	10.886.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	2367.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	30,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	83.900.000
Rincian Output		:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	30.00	Orang	83.900.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	2367.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	196.400.000
Rincian Output		:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00	Dokumen	60.000.000
			02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.00	Dokumen	80.100.000
			03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Dokumen	56.300.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan  
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.  
Victor Gustaaf Manoppo  
NRP. 69030175

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
I B. SUMBER DANA**



DS:4010-9307-9817-8982

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 Unit Organisasi : (07) DJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
 Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
 Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

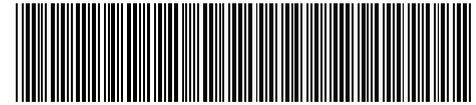
Halaman : I B. 1

				Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	16.846.280.000	Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	11.421.280.000	(2) RPLN	US\$	0 Rp.	0
2. PNPB	Rp.		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	(2) RHLN	US\$	0 Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0	
5. Hibah Langsung	Rp.	0	d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0	
6. SBSN PBS	Rp.	0	e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0	
2. Rincian Pinjaman / Hibah :			f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0	

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4010-9307-9817-8982

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	8.167.000	8.565.780	113.500	-	-	16.846.280		
032.07.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	-	4.236.500	113.500	-	-	4.350.000		
2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	-	4.236.500	113.500	-	-	4.350.000		
2362.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	200.000	-	-	-	200.000	13 . 51	
04	PNBP	-	200.000	-	-	-	200.000	042@	
2362.PCA	Perizinan Produk (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	1.752.592	-	-	-	1.752.592	13 . 51	
04	PNBP	-	1.752.592	-	-	-	1.752.592	042@	
2362.PEE	Kemitraan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	150.000	-	-	-	150.000	13 . 51	
04	PNBP	-	150.000	-	-	-	150.000	042@	
2362.QMA	Data dan Informasi Publik (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	1.211.218	-	-	-	1.211.218	13 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4010-9307-9817-8982

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 PNBP		-	1.211.218	-	-	-	1.211.218	042@	
2362.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	-	113.500	-	-	113.500	13 . 51	
04 PNBP		-	-	113.500	-	-	113.500	042@	
2362.REB	Konservasi Jenis/Spesies (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	572.690	-	-	-	572.690	13 . 51	
04 PNBP		-	572.690	-	-	-	572.690	042@	
2362.SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	350.000	-	-	-	350.000	13 . 51	
04 PNBP		-	350.000	-	-	-	350.000	042@	
<b>032.07.HB</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</b>	-	<b>1.075.000</b>	-	-	-	<b>1.075.000</b>		
<b>2365</b>	<b>Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	-	<b>200.000</b>	-	-	-	<b>200.000</b>		
2365.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	200.000	-	-	-	200.000	13 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



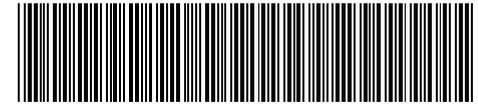
DS:4010-9307-9817-8982

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 3  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	PNBP	-	200.000	-	-	-	200.000	042	
<b>2366</b>	<b>Penataan Ruang Laut</b>	-	<b>875.000</b>	-	-	-	<b>875.000</b>		
2366.PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	875.000	-	-	-	875.000	13 . 51	
04	PNBP	-	875.000	-	-	-	875.000	042@	
<b>032.07.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>8.167.000</b>	<b>3.254.280</b>	-	-	-	<b>11.421.280</b>		
<b>2367</b>	<b>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut</b>	<b>8.167.000</b>	<b>3.254.280</b>	-	-	-	<b>11.421.280</b>		
2367.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	8.167.000	2.973.980	-	-	-	11.140.980	13 . 51	
01	RM	8.167.000	2.973.980	-	-	-	11.140.980	042@	
2367.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	83.900	-	-	-	83.900	13 . 51	
01	RM	-	83.900	-	-	-	83.900	042@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4010-9307-9817-8982

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 4  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2367.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	196.400	-	-	-	196.400	13 . 51	
01 RM		-	196.400	-	-	-	196.400	042@	
<b>JUMLAH</b>		<b>8.167.000</b>	<b>8.565.780</b>	<b>113.500</b>	-	-	<b>16.846.280</b>		

Jakarta, 02 Desember 2024  
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan  
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.  
Victor Gustaaf Manoppo  
NRP. 69030175



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4010-9307-9817-8982

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : III. 2  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		- PNBP (425259)	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	903.420
		- PNBP (425629)	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	896.580

Jakarta, 02 Desember 2024  
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan  
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.  
Victor Gustaaf Manoppo  
NRP. 69030175

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
IV A. B L O K I R**



DS:4010-9307-9817-8982

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT  
Kode dan Nama Satker : [477425] BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
<b>477425</b>	<b>BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK</b>		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 3.247.956		
	52 Belanja Barang Rp. 3.134.456		
	53 Belanja Modal Rp. 113.500		
<b>032.07.FD</b>	<b>Program Kualitas Lingkungan Hidup</b>		
<b>2362</b>	<b>Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan</b>		
<b>2362.PBW</b>	<b>Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan</b>		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 145.392		
	Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.900		
	Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
<b>2362.PCA</b>	<b>Perizinan Produk</b>		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 945.064		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 40.800		
	Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.540		
	Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
		<b>2362.PEE</b>	<b>Kemitraan</b>
		524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 100.260
			Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
		Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 93.696
			Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
		Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.080
			Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
		Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		<b>2362.QMA</b>	<b>Data dan Informasi Publik</b>
		524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 426.918
			Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 91.290
			Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
		Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		<b>2362.RAL</b>	<b>Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan</b>
		532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin(PNBP)
			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 113.500
			Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		<b>2362.REB</b>	<b>Konservasi Jenis/Spesies</b>
		524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
IV A. B L O K I R**



DS:4010-9307-9817-8982

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT  
Kode dan Nama Satker : [477425] BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : IV.A. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 183.240 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya <b>Program Dukungan Manajemen</b> <b>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut</b>
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.160 Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	<b>032.07.WA</b> <b>2367</b> <b>2367.EBA</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b> 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 105.040 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
<b>2362.SCC</b>	<b>Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan</b> 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 197.080 Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.600 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
<b>032.07.HB</b> <b>2366</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</b> <b>Penataan Ruang Laut</b>	<b>2367.EBC</b>	<b>Layanan Manajemen SDM Internal</b> 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 36.300 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
<b>2366.PBT</b>	<b>Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan</b> 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 526.640 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	<b>2367.EBD</b>	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b> 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 71.156 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 18.700 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 40.260		

Jakarta, 02 Desember 2024  
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan  
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.  
Victor Gustaaf Manoppo  
NRP. 69030175

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
IV B. C A T A T A N**



DS:4010-9307-9817-8982

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT  
Kode dan Nama Satker : [477425] BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024  
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan  
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.  
Victor Gustaaf Manoppo  
NRP. 69030175



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN



EKONOMI BIRU **UNTUK**  
INDONESIA EMAS

# DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TAHUN 2025

## DIPA PETIKAN REVISI KE 05

### BPSPL PONTIANAK

### 2025



**BPSPL  
PONTIANAK**  
DIREKTORAT SENDERAL  
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN  
RUANG LAUT

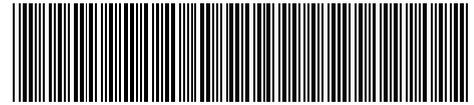


BPSPL Pontianak





**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 032.07.2.477425/2025**



DS:4010-9307-9817-8982

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

**Revisi ke 05**

Tanggal : 14 Juli 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2. Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
3. Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
4. Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK
- Sebesar : Rp. 16.846.280.000 ( ENAM BELAS MILIAR DELAPAN RATUS EMPAT PULUH ENAM JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

**Terlampir**

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

**Terlampir**

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	11.421.280.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	5.425.000.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PONTIANAK (042) Rp. 16.846.280.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
LUKY ALFIRMAN  
NIP. 197003271995031002

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025**



DS:4010-9307-9817-8982

Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

---

04	EKONOMI	Rp.	11.621.280.000
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	Rp.	11.621.280.000
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp.	5.225.000.000
05.04	KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	Rp.	5.225.000.000

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025**



DS:4010-9307-9817-8982

Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	Rp.	4.350.000.000
FD.2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	Rp.	4.350.000.000
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Rp.	1.075.000.000
HB.2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp.	200.000.000
HB.2366	Penataan Ruang Laut	Rp.	875.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	11.421.280.000
WA.2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Rp.	11.421.280.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4010-9307-9817-8982

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : I A. 1

Program	:	032.07.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup				4.350.000.000
Kegiatan	:	2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan				4.350.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output 1	:	2362.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		2,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	200.000.000
Rincian Output	:	01 PBW.001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi Ekosistem (PN)		2,00	Rekomendasi Kebijakan	200.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	2362.PCA	Perizinan Produk		5,00	Produk, Keputusan	1.752.592.000
Rincian Output	:	01 PCA.002	Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan		5,00	Produk	1.752.592.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	2362.PEE	Kemitraan		1,00	Kesepakatan	150.000.000
Rincian Output	:	01 PEE.001	Kerjasama, Jejaring dan Kemitraan Konservasi Ekosistem (PN)		1,00	Kesepakatan	150.000.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	2362.QMA	Data dan Informasi Publik		5,00	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	1.211.218.000
Rincian Output	:	01 QMA.001	Data dan Informasi Konservasi Ekosistem (PN)		1,00	dokumen	661.218.000
		02 QMA.002	Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan		4,00	dokumen	550.000.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	2362.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan		5,00	Unit	113.500.000
Rincian Output	:	01 RAL.001	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Ekosistem (PN)		5,00	Unit	113.500.000
Klasifikasi Rincian Output 6	:	2362.REB	Konservasi Jenis/Spesies		2,00	Jenis	572.690.000
Rincian Output	:	01 REB.001	Konservasi Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendic Cites (kumulatif) (PN)		2,00	Jenis	572.690.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



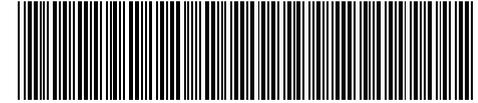
DS:4010-9307-9817-8982

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : I A. 2

Konservasi Jenis/Spesies				Jenis		
Klasifikasi Rincian Output	7	2362.SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	39,00	Orang, Kegiatan	350.000.000
Rincian Output		01 SCC.001	Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya (PN)	15,00	Orang	100.000.000
		02 SCC.002	Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Kompetensinya (PN)	24,00	Orang	250.000.000
Program		032.07.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			1.075.000.000
Kegiatan		2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			200.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan						
Klasifikasi Rincian Output	1	2365.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	200.000.000
Rincian Output		01 PBW.001	Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar (PN)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	200.000.000
Kegiatan		2366	Penataan Ruang Laut			875.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	2366.PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Materi Teknis, Dokumen	875.000.000
Rincian Output		01 PBT.009	Rekomendasi kebijakan verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang beresiko rendah (PN)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	875.000.000
Program		032.07.WA	Program Dukungan Manajemen			11.421.280.000
Kegiatan		2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut			11.421.280.000
Indikator Kinerja Kegiatan						

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4010-9307-9817-8982

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	1	:	2367.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	8,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	11.140.980.000
Rincian Output		:	01	EBA.956 Layanan BMN	4.00	Layanan	35.780.000
			02	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	45.300.000
			03	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	64.000.000
			04	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	109.900.000
			05	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	10.886.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	2367.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	30,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	83.900.000
Rincian Output		:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	30.00	Orang	83.900.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	2367.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	196.400.000
Rincian Output		:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00	Dokumen	60.000.000
			02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.00	Dokumen	80.100.000
			03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Dokumen	56.300.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan  
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.  
Victor Gustaaf Manoppo  
NRP. 69030175

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

**NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025**

**I B. SUMBER DANA**



DS:4010-9307-9817-8982

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
 Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
 Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : I B. 1

1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	16.846.280.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	Pagu	0	Rp.	Ekuivalen Rupiah	0
1. Rupiah Murni	Rp.	11.421.280.000		(2) RPLN	US\$		0	Rp.		0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$		0	Rp.		0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$		0	Rp.		0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR		0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR		0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR		0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR		0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4010-9307-9817-8982

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	8.167.000	8.565.780	113.500	-	-	16.846.280		
032.07.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	-	4.236.500	113.500	-	-	4.350.000		
2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	-	4.236.500	113.500	-	-	4.350.000		
2362.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	200.000	-	-	-	200.000	13 . 51	
04	PNBP	-	200.000	-	-	-	200.000	042@	
2362.PCA	Perizinan Produk (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	1.752.592	-	-	-	1.752.592	13 . 51	
04	PNBP	-	1.752.592	-	-	-	1.752.592	042@	
2362.PEE	Kemitraan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	150.000	-	-	-	150.000	13 . 51	
04	PNBP	-	150.000	-	-	-	150.000	042@	
2362.QMA	Data dan Informasi Publik (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	1.211.218	-	-	-	1.211.218	13 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4010-9307-9817-8982

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 PNPB		-	1.211.218	-	-	-	1.211.218	042@	
2362.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	-	113.500	-	-	113.500	13 . 51	
04 PNPB		-	-	113.500	-	-	113.500	042@	
2362.REB	Konservasi Jenis/Spesies (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	572.690	-	-	-	572.690	13 . 51	
04 PNPB		-	572.690	-	-	-	572.690	042@	
2362.SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	350.000	-	-	-	350.000	13 . 51	
04 PNPB		-	350.000	-	-	-	350.000	042@	
<b>032.07.HB</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</b>	-	<b>1.075.000</b>	-	-	-	<b>1.075.000</b>		
<b>2365</b>	<b>Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	-	<b>200.000</b>	-	-	-	<b>200.000</b>		
2365.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	200.000	-	-	-	200.000	13 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4010-9307-9817-8982

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 3  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	PNBP	-	200.000	-	-	-	200.000	042	
<b>2366</b>	<b>Penataan Ruang Laut</b>	-	<b>875.000</b>	-	-	-	<b>875.000</b>		
2366.PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	875.000	-	-	-	875.000	13 . 51	
04	PNBP	-	875.000	-	-	-	875.000	042@	
<b>032.07.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>8.167.000</b>	<b>3.254.280</b>	-	-	-	<b>11.421.280</b>		
<b>2367</b>	<b>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut</b>	<b>8.167.000</b>	<b>3.254.280</b>	-	-	-	<b>11.421.280</b>		
2367.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	8.167.000	2.973.980	-	-	-	11.140.980	13 . 51	
01	RM	8.167.000	2.973.980	-	-	-	11.140.980	042@	
2367.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	83.900	-	-	-	83.900	13 . 51	
01	RM	-	83.900	-	-	-	83.900	042@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4010-9307-9817-8982

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 4  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
2367.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	196.400	-	-	-	196.400	13 . 51	
01 RM		-	196.400	-	-	-	196.400	042@	
<b>JUMLAH</b>		<b>8.167.000</b>	<b>8.565.780</b>	<b>113.500</b>	-	-	<b>16.846.280</b>		

Jakarta, 02 Desember 2024  
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan  
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.  
Victor Gustaaf Manoppo  
NRP. 69030175



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4010-9307-9817-8982

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : III. 2  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		- PNBP (425259)	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	75.285	903.420
		- PNBP (425629)	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	74.715	896.580

Jakarta, 02 Desember 2024  
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan  
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.  
Victor Gustaaf Manoppo  
NRP. 69030175

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
IV A. B L O K I R**



DS:4010-9307-9817-8982

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT  
Kode dan Nama Satker : [477425] BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
<b>477425</b>	<b>BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK</b>		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 3.247.956		
	52 Belanja Barang Rp. 3.134.456		
	53 Belanja Modal Rp. 113.500		
<b>032.07.FD</b>	<b>Program Kualitas Lingkungan Hidup</b>		
<b>2362</b>	<b>Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan</b>		
<b>2362.PBW</b>	<b>Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan</b>		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 145.392 Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.900 Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
<b>2362.PCA</b>	<b>Perizinan Produk</b>		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 945.064 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 40.800 Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.540 Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
		<b>2362.PEE</b>	<b>Kemitraan</b>
		524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 100.260 Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 93.696 Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.080 Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		<b>2362.QMA</b>	<b>Data dan Informasi Publik</b>
		524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 426.918 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 91.290 Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		<b>2362.RAL</b>	<b>Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan</b>
		532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 113.500 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		<b>2362.REB</b>	<b>Konservasi Jenis/Spesies</b>
		524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
IV A. B L O K I R**



DS:4010-9307-9817-8982

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT  
Kode dan Nama Satker : [477425] BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : IV.A. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 183.240 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya <b>Program Dukungan Manajemen</b> <b>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut</b>
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.160 Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	<b>032.07.WA</b> <b>2367</b> <b>2367.EBA</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b> 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 105.040 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
<b>2362.SCC</b>	<b>Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan</b> 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 197.080 Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.600 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
<b>032.07.HB</b> <b>2366</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</b> <b>Penataan Ruang Laut</b>	<b>2367.EBC</b>	<b>Layanan Manajemen SDM Internal</b> 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 36.300 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
<b>2366.PBT</b>	<b>Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan</b> 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 526.640 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	<b>2367.EBD</b>	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b> 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 71.156 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 18.700 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 40.260		

Jakarta, 02 Desember 2024  
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan  
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.  
Victor Gustaaf Manoppo  
NRP. 69030175

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025  
IV B. C A T A T A N**



DS:4010-9307-9817-8982

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT  
Kode dan Nama Satker : [477425] BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024  
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan  
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.  
Victor Gustaaf Manoppo  
NRP. 69030175